

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Definisi kemiskinan

Membahas konsepsi kemiskinan tidak akan pernah terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan, bisa dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan *mutidimensional*.<sup>6</sup> Oleh karena itu, banyak terdapat terminologi kemiskinan baik yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan. Dalam pengertian konvensional, kemiskinan (hanya) dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (*income*) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan (Zikrullah, 2000, h. 11). Hal ini setidaknya terlihat pada batasan yang dikemukakan UNDP (1997) dalam Cox (2004, h. 9), bahwa seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya (hanya) berada dibawah garis kemiskinan<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara dunia ketiga baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah, kebanyakan (hanya) bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal.

Untuk itu, menurut Max Neef dalam Zikrullah (2000, h. 11), sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu di fahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu: (a) kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal; (b) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan; (d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang

---

<sup>6</sup> Mukhtar, "Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP di Desa Sukadanau", 2003.

<sup>7</sup> [www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang/2005/muchtar](http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang/2005/muchtar)

menyangkut nasib diri dan komunitas; (e) kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antara kelompok sosial, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas<sup>8</sup>.

Selanjutnya, Narhetali mengutip hasil penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan Yeates dan Mc Laughlin dari Bank Dunia (2000) yang menyatakan, bahwa orang miskin mempunyai penekanan yang berbeda dari pembuat kebijakan tentang hal-hal yang dipersepsi sebagai dimensi kemiskinan. Selain tingkat pendapatan, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, kaum miskin juga menekankan faktor psikologis seperti kepercayaan diri, ketidakberdayaan (*powerlessness*) serta pengucilan fisik dan sosial sebagai sumber kemiskinan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa bagi orang, kelompok, komunitas, masyarakat miskin, ternyata peningkatan pendapatan bukanlah satu-satunya hal yang amat penting. Tetapi, perlakuan humanis penuh harga diri, *self-respect* juga merupakan sesuatu yang amat bernilai (Kompas, 5 Maret 2003).

Mendefinisikan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh dimensi yang kita pergunakan. Namun apapun dimensi yang dipakai, pada dasarnya kemiskinan dapat dipilah dalam dua jenis berikut. Pertama, kemiskinan dalam arti absolut. Adalah kondisi riil manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan (menggunakan parameter) garis kemiskinan, yaitu suatu batas/besaran nilai (diukur dengan uang atau pangan –beserta kandungannya-) yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup.

Merujuk pada kriteria kemiskinan yang diajukan oleh *United Nations Development Program* (UNDP), US \$1 per hari per kepala adalah batas antara miskin dan tidak miskin.<sup>9</sup> Artinya, jika seseorang berpenghasilan dibawah US\$ 1 per hari maka dia akan digolongkan ke dalam kriteria miskin.

Berbeda dengan kriteria yang disusun UNDP, meskipun sebenarnya pertimbangan yang mendasarinya sama, Badan Pusat Statistik Indonesia dalam mengidentifikasi rumah tangga sasaran untuk penyaluran bantuan langsung tunai

---

<sup>8</sup> [www.depsos.go.id/modules](http://www.depsos.go.id/modules)

<sup>9</sup> [www.undp.org/mdg/basics.shtml](http://www.undp.org/mdg/basics.shtml)

(BLT), menyodorkan kriteria kemiskinan dengan satuan rumah tangga sebagai basis pengukuran. Kriteria rumah tangga miskin yang dirumuskan BPS tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>,
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan,
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester,
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan,
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah,
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu,
9. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun,
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari,
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik,
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan,
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD,

<sup>10</sup> -----, "Orang Miskin Bertambah" dalam *Kompas*, 2 September 2006.

Terlepas dari konteks penyusunan usulan penelitian ini, perlu disampaikan sedikit kritik terhadap kriteria kemiskinan yang dirumuskan oleh UNDP maupun BPS. Mengutip pendapat seorang penulis Afrika, Vandana Shiva, yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan dalam dua macam. "Ada gunanya membedakan konsep budaya mengenai kemiskinan sebagai hidup sesuai dengan kebutuhan, dengan kemelaratan sebagai serba kekurangan dari sudut material atau kebendaan akibat perampasan dan kekurangan." Konsep kemiskinan budaya adalah kondisi dianggap miskin karena tidak mengonsumsi makanan olahan yang dihasilkan dan diedarkan oleh jaringan agribisnis dunia (barang-barang yang dihasilkan untuk dan diedarkan melalui pasar). Selengkapnya mengenai konsep ini bisa dilihat dalam Vandana Shiva, 1997, *Bebas Dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 13-18.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Selain definisi di atas, BPS menggunakan kriteria kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan (makanan ditambah non-makanan). Dengan mempergunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2006, dapat ditunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 39,05 juta penduduk dari 222 juta total penduduk Indonesia. Atau dalam prosentase, 17,75% penduduk Indonesia adalah miskin. Jumlah penduduk miskin tahun 2006 mengalami peningkatan signifikan dibanding jumlah penduduk miskin 2005. Hasil Susenas Februari 2005 menunjukkan jumlah penduduk miskin 35,10 juta 220 juta total penduduk Indonesia, atau sebesar 15,97%.<sup>11</sup>

Konsep kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan dalam arti relatif. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin yang disandang seseorang jika dibandingkan terhadap orang lain. Orang yang mengalami kemiskinan relatif belum tentu tidak bisa hidup jika berada dalam kondisi ini.

Munculnya kemiskinan relatif disebabkan oleh perasaan *deprivation*, yaitu suatu keadaan dimana seseorang (masyarakat) bisa melihat kondisi tertentu tetapi tidak bisa ikut menikmati kondisi tersebut. Atau munculnya perasaan tertekan karena kondisi yang bersangkutan dibandingkan dengan kondisi pihak lain yang lebih baik.

Wirutomo (2003) mengatakan bahwa *deprivation* ini tergantung dari adanya dua hal, yaitu *demonstration effect* dan kesenjangan yang tidak adil.<sup>12</sup> Ringkasnya, *demonstration effect* bisa dikatakan sebagai pameran kekayaan kepada anggota masyarakat yang lebih miskin. Sedangkan yang dimaksud kesenjangan adalah adanya perbedaan (penghasilan/pendapatan) yang cukup jauh antara dua orang yang sebenarnya memiliki posisi sejajar/setara.

Meskipun banyak terminologi mengenai kemiskinan, tetapi secara umum dapat dinyatakan, bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Paulus Wirutomo, 2003, diktat kuliah *Teori Sosial Pembangunan* pada Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Univ. Indonesia, Jakarta.

yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan tersebut bisa diukur secara obyektif, dirasakan secara subyektif, atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan obyektif, subyektif, dan relatif tentang kemiskinan.

Upaya mengatasi kemiskinan tidak bisa terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran program. Menurut Mujiyadi B. dan Gunawan (2000), pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki.

## **2.2. Kemiskinan Secara Ekonomi**

### **2.2.1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah maupun nilai pendapatan (uang). Namun pengukurannya juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori. Kriteria pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar<sup>13</sup>.

### **2.2.2. Kemiskinan Relatif**

Pada konsep kemiskinan relatif, perhitungan kemiskinan didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dianggap miskin relatif jika pendapatannya termasuk 30% terendah dari distribusi pendapatan. Dengan

---

<sup>13</sup> Sonny Harry B. Harmadi “Pengganguan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” *Warta Demografi* Tahun 3, No3, 2007.

menggunakan kriteria ini, maka dapat dipastikan bahwa akan selalu ada penduduk miskin dalam suatu wilayah. Namun begitu dengan adanya asumsi pendapatan rata-rata masyarakat yang terus meningkat maka, garis kemiskinan juga terus meningkat. Di sini pengukuran garis kemiskinan tidak menjadi fokus, karena lebih berorientasi pada upaya untuk memperkecil disparitas pendapatan antara mereka yang berada di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (better-off). Meskipun demikian, sebenarnya ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Beberapa orang mengeluhkan bahwa mereka merasa terkucil dan rendah diri dalam pergaulan dengan orang "tidak miskin" meskipun secara absolut, sebenarnya orang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori miskin<sup>14</sup>

### 2.3. Kemiskinan dalam Hak Asasi Manusia

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa semua orang (warga negara) mempunyai hak akan kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H (Ayat 1)<sup>15</sup> dan Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 28 I Ayat (4)<sup>16</sup> dan Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>17</sup> membebankan kewajiban pemenuhan hak kepada pemerintah selain itu, Indonesia juga terikat dengan instrumen-instrumen Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR – 1976) yang mengakui hak setiap orang untuk menentukan nasibnya dengan usaha dan ekonomi yang dipilihnya sendiri, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak, hak atas pendidikan dan sebagainya<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Sonny Harry B. Harmadi "Pengganguan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Warta Demografi Tahun 3, No3, 2007.

<sup>15</sup> UUD 1945 Amandemen keempat pasal 28 H Ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

<sup>16</sup> UUD 1945 Amandemen keempat pasal 28 I Ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

<sup>17</sup> UU NO 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

<sup>18</sup> LBH APIK Jakarta, "*Hak Asasi Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah*". Lihat juga "*Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*". oleh oleh Baehr, Peter *et al* (Yayasan Obor Indonesia). hal. 335. ICESCR atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini dibuat untuk mengakui kebebasan dari

Dalam Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang dikeluarkan oleh Tim dari Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) dan Bappenas juga menyatakan bahwa kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan didasarkan atas pendekatan berbasis hak.

Dalam perkembangannya, pemerintah dalam mengurangi kemiskinan bersandar kepada pertumbuhan perekonomian dengan keyakinan walaupun pertumbuhan pada awalnya akan meningkatkan ketidakmerataan pendapatan tetapi dalam jangka panjang akan mengurangi kemiskinan, sesuai dengan hipotesa “*inverted U-curve*” Simon Kuznet. Sehingga, seringkali pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pelaksana pertumbuhan (pengusaha) daripada pemangku hak (warga miskin).

Disadari atau tidak, kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi sering memiskinkan warga negara, misalnya perampasan tanah hak ulayat untuk perkebunan besar, pengusuran pemukiman untuk industri atau pusat perbelanjaan, dll. Diatas kertas pertumbuhan perekonomian di wilayah yang terjadi perampasan hak tersebut meningkat, namun dampak yang dihasilkan, terjadi pemiskinan. Seringkali pertumbuhan perekonomian suatu wilayah tinggi namun distribusi manfaatnya lebih besar dirasakan oleh kalangan menengah atas daripada orang miskin. Untuk itu, pertumbuhan tidak hanya bisa diukur dengan naik atau turun dari tahun ke tahun tetapi juga harus menunjukkan seberapa besar proporsi manfaat pertumbuhan yang dirasakan oleh orang miskin (*Pro poor growth*)

---

ketakutan dan kekurangan yang hanya dapat dicapai kalau tercipta kondisi-kondisi dimana setiap orang menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politik.

## 2.4. Teori pertumbuhan

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika kuantitas outputnya bertambah. Salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah Pendapatan Nasional (yang dikenal dengan istilah *Gross Domestic Product/GDP* )

Ada 3 pendekatan dalam menghitung GDP

### 1. Pendekatan Pengeluaran

$Y = \text{Konsumsi} + \text{Investasi} + \text{pengeluaran Pemerintah} + (\text{pendapatan ekspor} - \text{pengeluaran impor})$

### 2. Pendekatan Pendapatan

$PDB = \Sigma [(\text{upah \& gaji}) + \text{Surplus Usaha} + \text{Penyusutan} + \text{Pajak Tidak Langsung}]$

### 3. Pendekatan Produksi

$PDB = (\text{harga barang})_i \times (\text{jumlah barang})_i$

#### 2.4.1 Hipotesa *inverted U-curve*

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu negara, melalui perubahan yang dilakukannya terhadap struktur ekonomi, secara potensial mempengaruhi distribusi pendapatan. Secara empiris berdasarkan data antar negara (*cross-section*), Kuznets (1955) memelopori penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan. Simon Kuznets menemukan adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hipotesa “*inverted U-curve*”. Hipotesa tersebut menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan dalam suatu negara meningkat pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonominya, cenderung tidak berubah pada tahap menengah, dan terus menurun ketika negara tersebut menjadi sejahtera.

Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di daerah pedesaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan sektor modern (sektor industri dan jasa-jasa) di daerah perkotaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi. Akibatnya terjadi migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang meningkatkan ketidakmerataan pendapatan di negara tersebut. Kuznets juga menekankan terjadinya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa-jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan per kapita yang diharapkan juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat pada awal-awal pembangunan. Kevalidan hipotesa “*inverted U-curve*” membawa implikasi bahwa jika suatu negara berada pada tahap-tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkatkan ketidakmerataan pendapatan sehingga pengurangan kemiskinan akan memakan waktu yang lebih lama (Adams, 2004). Karenanya hipotesa ini sangat kontroversial dan menjadi bahan perdebatan, mempengaruhi pemikiran, dan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.

Penelaahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya juga menjadi sangat menarik karena begitu beragamnya kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari berbagai penelitian tersebut, ada yang hasilnya mendukung penuh hipotesa “*inverted U-curve*” (Oshima, 1962), mendukung sebagian (Ahluwalia, 1976a dan 1976b), ataupun menolaknya sama sekali (Deininger dan Squire, 1996). Akan tetapi, ketiga penelitian tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panel internasional (bukan negara tunggal), sehingga apapun hasil penelitiannya harus ditanggapi secara hati-hati. Hal ini terutama sekali karena data distribusi pendapatan antar negara, betapapun *comparable* nya, kemungkinan besar tetap tidak bisa dibandingkan sebagai akibat adanya perbedaan konsep pendekatan pendapatan/pengeluaran dalam penghitungan ketidakmerataan pendapatan, perbedaan unit populasi, dan cakupan survei.

Galbraith dan Kum (2002), memperlihatkan hal tersebut ketika membahas beragamnya hasil-hasil penelitian yang menggunakan data penelitian Deininger dan Squire.

Perkembangan terakhir dari penelitian-penelitian mengenai pembangunan ekonomi, juga tidak lagi berfokus pada berlaku atau tidaknya hipotesa “*inverted U-curve*” dari Kuznets, tapi lebih kepada pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dengan kemungkinan terjadi peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang mengurangi efektifitas dari pengurangan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh Wodon (1999) di Bangladesh dan Lin (2003) di China. Selanjutnya berkembang penelitian-penelitian dengan fokus pada efektifitas pengurangan kemiskinan oleh pertumbuhan ekonomi (*Pro-poor Growth Index*) yang dipelopori oleh Kakwani dan Pernia (2000) dan dilanjutkan oleh Ravallion dan Chen (2003), Son (2003), dan Ravallion (2004), dimana dikatakan bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan pendapatan akan tetapi hal itu mungkin tidak mengurangi efektifitas pengurangan kemiskinannya seperti yang juga diperlihatkan oleh Ravallion (2005).

#### 2.4.2 Teori pembangunan Lewis<sup>19</sup>

W. Arthur Lewis, salah satu ekonom besar dan penerima Hadiah Nobel pada pertengahan dekade 1950 merupakan pencetus model teoritis pembangunan yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural (*structural transformation*) yang membahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an.

Menurut model ini, perekonomian yang terbelakang terdiri dari 2 sektor, yakni (1) Sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol (surplus tenaga kerja). (2) Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang

---

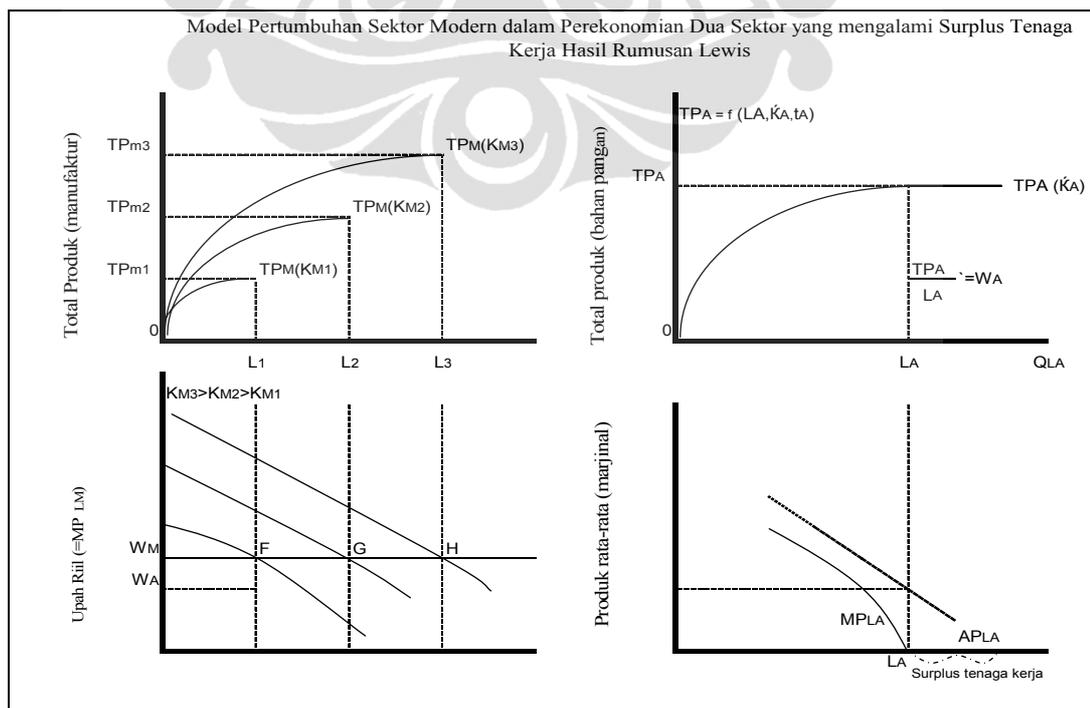
<sup>19</sup> Lewis dalam Micheal P Todaro dan Stephen C Smith ,2002, “Pembangunan ekonomi di dunia ketiga” edisi Kedelapan, Erlangga. Hal 133-139

ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten.

Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern tersebut. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Peningkatan investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah, dengan asumsi bahwa "para kapitalis" yang berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Yang terakhir, tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) diasumsikan konstan dan, berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. Pada tingkat upah di daerah perkotaan yang konstan, maka kurva penawaran tenaga kerja pedesaan dianggap elastis sempurna

Secara Singkat, Pemikiran Lewis tergambar dalam diagram di bawah ini

Gambar 2.1. Model Pertumbuhan Sektor Modern dalam Perekonomian Dua Sektor yang mengalami Surplus Tenaga Kerja Hasil Rumusan Lewis.



Sumber : Lewis dalam Micheal P Todaro dan Stephen C Smith ,2002, “Pembangunan ekonomi di dunia ketiga” edisi Kedelapan, Erlangga. Hal 133-139

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (*self sustaining growth*) dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut diatas diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Dengan demikian, tatkala tingkat upah serta kesempatan kerja di sektor modern terus mengalami pertumbuhan, maka kemiringan kurva penawaran tenaga kerja bersifat positif. Transformasi struktural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan dan perekonomian itu pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di daerah pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasikan kepada pola kehidupan perkotaan.

### **Kritik terhadap model lewis**

Meskipun model dua sektor Lewis ini secara sederhana dan secara umum dapat menggambarkan pengalaman sejarah pertumbuhan ekonomi di negara-negara Barat, namun empat dari asumsi-asumsi utamanya ternyata sama sekali tidak cocok dengan kenyataan institusional dan ekonomis di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga sekarang ini<sup>20</sup>;

1. Model ini secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Semakin cepat tingkat akumulasi modalnya maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern. Semakin cepat tingkat akumulasi modalnya, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern dan semakin cepat pula penciptaan lapangan kerja baru. Akan tetapi, apa yang akan terjadi seandainya keuntungan para kapitalis justru diinvestasikan kembali dalam bentuk barang-barang modal yang lebih canggih dan lebih hemat tenaga kerja, bukan pada barang modal yang hanya merupakan duplikasi dari modal yang sudah ada sebelumnya seperti yang diasumsikan oleh model Lewis.

---

<sup>20</sup> Micheal P Todaro and Stephen C Smith ,2002, “Pembangunan ekonomi di dunia ketiga” edisi Kedelapan, Erlangga. Hal 137-139

2. Asumsi bahwa di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penyerapan faktor-faktor produksi secara optimal (*full employment*). Namun sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang sebaliknya yang mungkin terjadi di negara-negara ketiga (yaitu jumlah pengangguran di perkotaan cukup besar).
3. Dugaan tentang pasar tenaga kerja kompetitif di sektor modern akan menjamin keberlangsungan upah riil di perkotaan yang konstan sampai pada suatu titik di mana surplus penawaran tenaga kerja habis terpakai, tidak dapat diterima. Salah satu ciri yang mengesankan dari penentuan tingkat upah dan pasar tenaga kerja perkotaan di negara berkembang adalah upah yang diberikan cenderung meningkat sangat besar dari waktu ke waktu, baik secara absolut maupun secara relatif. Faktor-faktor kelembagaan seperti tawar menawar serikat buruh, penentuan Upah Minimum Propinsi (UMP), dll.
4. Keadaan masyarakat miskin kota yang tidak tersentuh oleh pertumbuhan yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori Lewis. Secara tidak langsung, teori ini adalah pemusatan pertumbuhan pada sektor modern di perkotaan. Akibatnya arus urbanisasi meningkat, namun tidak dapat ditampung oleh sektor industri

#### **2.4.3 Model-Model Revolusi Ketergantungan Internasional**

Model-model revolusi ketergantungan internasional didukung oleh kalangan intelektual negara-negara Dunia Ketiga, sebagai akibat dari tidak kunjung terwujudnya prediksi model-model pertumbuhan ekonomi dari Barat. Pada intinya, model ketergantungan internasional memandang negara-negara dunia sebagai korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik, dan ekonomi, baik yang berskala domestik maupun internasional. Mereka semua telah terjebak ke dalam perangkap ketergantungan (*dependence*) dan dominasi (*dominance*) negara-negara kaya. Di dalam pendekatan ini terdapat 3 aliran pemikiran yang utama, yaitu: model ketergantungan neokolonial (*neocolonial dependence model*), model paradigma palsu (*false paradigm model*), serta tesis pembangunan dualistik

(*dualistik development thesis*)<sup>21</sup>.

Aliran pemikiran yang sesuai digunakan untuk permasalahan ini adalah model paradigma palsu. Aliran ini mencoba untuk menghubungkan keterbelakangan dunia ketiga dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan oleh para pengamat atau ‘pakar’ internasional, meskipun saran-saran tersebut baik tetapi sering tidak di informasikan secara tepat; bias; dan hanya didasarkan pada suatu kebudayaan saja yang bernaung di bawah lembaga-lembaga bantuan negara-negara maju dan organisasi-organisasi donor multinasional. Faktor-faktor kelembagan di negara-negara dunia ketiga, seperti masih pentingnya struktur sosial tradisional (yakni kesukuan, kasta, kelas, dsb) sangat tidak meratanya hak kepemilikan tanah dan kekayaan lainnya; tidak memadainya kontrol kalangan elit terhadap aset-aset keuangan domestik dan internasional; serta sangat timpangnya kesempatan ataupun kemudahan dalam rangka mendapatkan kredit usaha selama ini tidak dipahami dan di perhitungkan secara memadai, serta tidak terdatanya masyarakat miskin dalam registrasi daerah, sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh para ahli internasional tadi yang biasanya mereka dasarkan pada model-model surplus tenaga kerja dari Lewis atau perubahan struktural dari Chenery, dalam banyak hal hanya melayani kepentingan sepihak kelompok-kelompok domestik maupun internasional yang sedang berkuasa<sup>22</sup>.

Disamping itu, menurut argumen paradigma palsu ini, para cendekiawan di universitas terkemuka, para pemimpin serikat-serikat pekerja, para ekonom di lembaga pemerintahan, dan para pejabat negara-negara berkembang pada umumnya, hampir semua mendapat didikan dan latihan dari lembaga-lembaga di negara maju. Seringkali tanpa disadari, mereka terlalu banyak menelan konsep-konsep asing dan model-model teoritis yang serba hebat tapi sebenarnya tidak cocok dan tidak tepat diterapkan di daerah mereka sendiri. Akibat ketiadaan atau terbatasnya pengetahuan yang tepat guna untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan, maka kalangan elit tersebut justru cenderung menjadi pembela

---

<sup>21</sup> Micheal P Todaro and Stephen C Smith ,2002, “Pembangunan ekonomi di dunia ketiga” edisi Kedelapan, Erlangga. Hal 138-139

<sup>22</sup> Idem

keyakinan asing yang melupakan atau mengabaikan adanya sistem kebijakan elitis serta struktur kelembagaan yang khas negara-negara berkembang.

## 2.5. Hubungan Pertumbuhan, Kemiskinan dan Pemerataan

Dalam penelitiannya mengenai kemiskinan di Republik Rakyat China (RRC), dengan menggunakan data time series yang terdiri dari data pendapatan bersih perkapita, indeks Gini dan berbagai ukuran kemiskinan, serta dengan mengasumsikan bahwa distribusi pendapatan mengikuti pola distribusi log normal dan dengan melakukan dekomposisi indeks pengurangan kemiskinan menurut pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan, Lin (2003) menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di RRC antara tahun 1985 – 2001 selain mengurangi kemiskinan juga meningkatkan ketidakmerataan yang pada akhirnya mengurangi efektifitas pengurangan kemiskinan<sup>23</sup>.

Wodon, dengan menggunakan spesifikasi model data panel dalam bentuk log-log dan melibatkan 70 observasi secara nasional (30 observasi untuk daerah perkotaan dan 40 observasi untuk daerah pedesaan) selama periode tahun 1983 – 1996, juga melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketidakmerataan baik secara nasional maupun menurut daerah perkotaan dan daerah pedesaan di Bangladesh. Wodon menyimpulkan terdapat hubungan korelasi yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan baik secara nasional maupun di daerah perkotaan, dimana nilai estimasi parameternya untuk perkotaan lebih besar daripada secara nasional. Sedangkan untuk pedesaan tidak terdapat hubungan yang sistematis antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan<sup>24</sup>.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin (2003) berupa dekomposisi penurunan angka kemiskinan (head Count Index/ HCI) di daerah pedesaan RRC 0, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu mengurangi kemiskinan sedangkan ketidakmerataan pendapatan juga selalu mengurangi

<sup>23</sup> Lin. Bo Q., 2003 “Economic Growth, Income Inequality and Poverty reduction in People’s Republik of China”. *Asia Review* Vol 20 (2) hal 105-124

<sup>24</sup> Wodon, Quentin. 1999. “Growth, Poverty, and Inequality : A Region Panel for Bangladesh. “ Policy Research Working Paper No 2072, World Bank South Asia Region

efektivitas pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi<sup>25</sup>.

Adam (2004) melakukan penelitian mengenai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (komponen pengurangan kemiskinan yang berasal dari pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menggunakan panel data 60 negara berkembang (tidak termasuk negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah), garis kemiskinan sebesar 1 dolar/perkapita/perhari dan dengan model first difference log-log. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai berbeda tergantung proxy terhadap data pertumbuhan ekonomi yang digunakannya. Jika menggunakan data konsumsi, elastisitasnya adalah -2,79 yang berarti bahwa kenaikan 10% dari konsumsi akan menurunkan kemiskinan sebesar 27,9%. Sedangkan bila pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data perubahan GDP per kapita akan menghasilkan elastisitas sebesar -2,27 (tidak signifikan)<sup>26</sup>.

Wodon (1999) juga melakukan dekomposisi terhadap pengurangan kemiskinan, yaitu dengan mengukur elastisitas (gross) dari kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $\gamma$ ), elastisitas dari ketidakmerataan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, elastisitas dari kemiskinan terhadap ketidakmerataan pendapatan ( $\delta$ ) dan elastisitas (net) dari kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $\lambda$ ). Untuk mengukur elastisitas-elastisitas tersebut diatas, Wodon menguraikan model sebagai berikut :

$$\text{Log Pkt} = \hat{W} + \gamma \log \text{Wkt} + \delta \text{Log Gkt} + \hat{W}k + \text{Vkt} \quad (\text{Persamaan 1})$$

Dan

$$\lambda = \gamma + \beta\delta \quad (\text{Persamaan 2})$$

dimana :

Pkt : Angka kemiskinan untuk area ke k periode ke t

<sup>25</sup> Lin. Bo Q., 2003 "Economic Growth, Income Inequality and Poverty reduction in People's Republik of China". Asia Review Vol 20 (2) hal 105-124

<sup>26</sup> Adam Jr, Richard H., 2004 "Economic Growth, Inequality and poverty: Estimating the Growth Elasticity of Poverty" World Development, 32 (12) hal 1989 – 2014.

Wkt : Indeks Gini untuk area ke k – periode ke t

$\hat{W}k$  : Fixed/random effect untuk area ke k

Vkt ; Disturbance term

Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang sistematis antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan. Juga terlihat bahwa terhadap pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi lebih terasa pengaruhnya di daerah pedesaan daripada secara nasional maupun untuk daerah perkotaan<sup>27</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Ahluwalia berdasarkan data cross section dari berbagai negara berkembang, mengungkapkan bahwa meskipun proses pembangunan ekonomi memang menyebabkan pembagian hasil-hasil pembangunan yang tidak merata, namun tingkat pendapat absolute dari golongan miskin tidak merosot dengan perkataan lain, meskipun ketimpangan relative. Bertambah besar dengan pembangunan ekonomi, namun kemiskinan absolut tidak bertambah gawat (Ahluwalia, 1976)<sup>28</sup>.

## **2.6. Pro Poor Growth : Konsep dan pengukuran**

Seperti halnya pengukuran kemiskinan, definisi terhadap *pro poor growth* dapat dibedakan dalam 2 kategori, pertama, *absolute pro poor growth* dan kedua *relative pro poor growth*.

### ***Absolute Pro Poor Growth***

Pertumbuhan ekonomi yang pro terhadap kemiskinan sering diasosiasikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi penduduk miskin dan memberi mereka peluang untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya. Bank Dunia juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi yang pro terhadap kemiskinan

<sup>27</sup> Wodon, Quentin. 1999. "Growth, Poverty, and Inequality : A Region Panel for Bangladesh." Policy Research Working Paper No 2072, World Bank South Asia Region

<sup>28</sup> Ahluwalia, Montek S., 1976. "Inequality, Poverty, and Development" *Journal of Development Economic*, 3 (4)

sebagai pertumbuhan ekonomi yang efeknya bisa menurunkan angka kemiskinan (Ravallion, 2004).

Kakwani et.al (2004), mendefinisikan *absolute pro poor growth*, adalah jika penduduk miskin menerima keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara absolute minimal sama atau lebih dari yang diterima oleh penduduk tidak miskin dengan kata lain pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan angka kemiskinan dan di saat yang sama juga menurunkan ketidakmerataan pendapatan.

Akan tetapi, defenisi ini sangat lemah dan belum memberikan jaminan keadilan bagi penduduk miskin dalam hal penerimaan terhadap bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dengan defenisi ini, penduduk miskin mungkin hanya menerima bagian yang sangat kecil dari pertumbuhan ekonomi, tetapi karena dengan bagian tersebut sebagian kecil dari populasi penduduk miskin terangkat kemiskinannya, pertumbuhan ekonomi yang menyebabkannya tetap di sebut sebagai pertumbuhan ekonomi yang pro terhadap kemiskinan<sup>29</sup>.

### ***Relative Pro Poor Growth***

Kakwani et.al (2004), mendefinisikan *relative pro poor growth*, yaitu jika pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan keuntungan secara proporsional kepada penduduk miskin lebih dari penduduk yang tidak miskin. Ini berarti pertumbuhan ekonomi selain menurunkan angka kemiskinan, juga meningkatkan ketidakmerataan pendapatan secara relative.<sup>30</sup>

*Pro poor growth* dapat diukur melalui 3 pendekatan<sup>31</sup>. Pertama, Ukuran Agregat (*Growth Incidence Curve/GIC*) dan dekomposisi *Growth* dan *Inequality*). Kedua, Ukuran Absolut yakni; (*Growth Elasticity of Poverty/GEP*) dan *Rate of Pro poor growth*). Ketiga, Ukuran relative (*Poverty Bias of Growth/PBG*), *Pro poor growth Index* (PPGI), *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) dan *Poverty Growth Curve* (PGC).

<sup>29</sup> Ravallion, Martin . 2004. *Pro poor growth : A Primer.*” Development Research Group, World Bank, Washinton DC.

<sup>30</sup> Kakwani, Nanak dan Ernesto M. Pernia, 2000. “What is *Pro poor growth*.” Asia Development Review, 18 (1) hal 1 - 16

<sup>31</sup> Idem

Cara sederhana untuk mengukur *pro poor growth* adalah dengan *Growth Elasticity of Poverty (GEP)*. *Growth Elasticity of Poverty* merupakan perubahan proporsional dalam *poverty headcount* diantara 2 periode waktu untuk perubahan satu persen pendapatan. Jika GEP lebih besar dari 1, berarti bahwa perubahan kecil pendapatan akan berdampak lebih besar dalam penurunan kemiskinan. Semakin besar GEP maka semakin besar penurunan dalam penurunan tingkat kemiskinan<sup>32</sup>. Pengukuran GEP menggunakan data *Head count* dan pertumbuhan dalam 2 periode yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sedangkan *Rate of Pro-Poor Growth* merupakan cara untuk mengukur *pro poor growth* dengan tidak hanya menghitung jumlah orang miskin tetapi juga melihat perubahan pendapatan orang miskin. Ravallion and Chen (2003) menggunakan *Growth Incidence Curves (GIC)* untuk mengukur *pro poor growth*. GIC menunjukkan tingkat pertumbuhan dalam periode tertentu pada setiap percentile dari distribusi.

Penelitian ini menggunakan metode *Growth Incidence Curve (GIC)* untuk melihat *pro poor growth*. Peneliti melihat bahwa *Growth Incidence Curve* yang merupakan pendekatan dari ukuran agregat lebih dapat menunjukkan karakteristik suatu pertumbuhan.

## 2.7. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004 – 2009)<sup>33</sup>, kemiskinan di defenisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

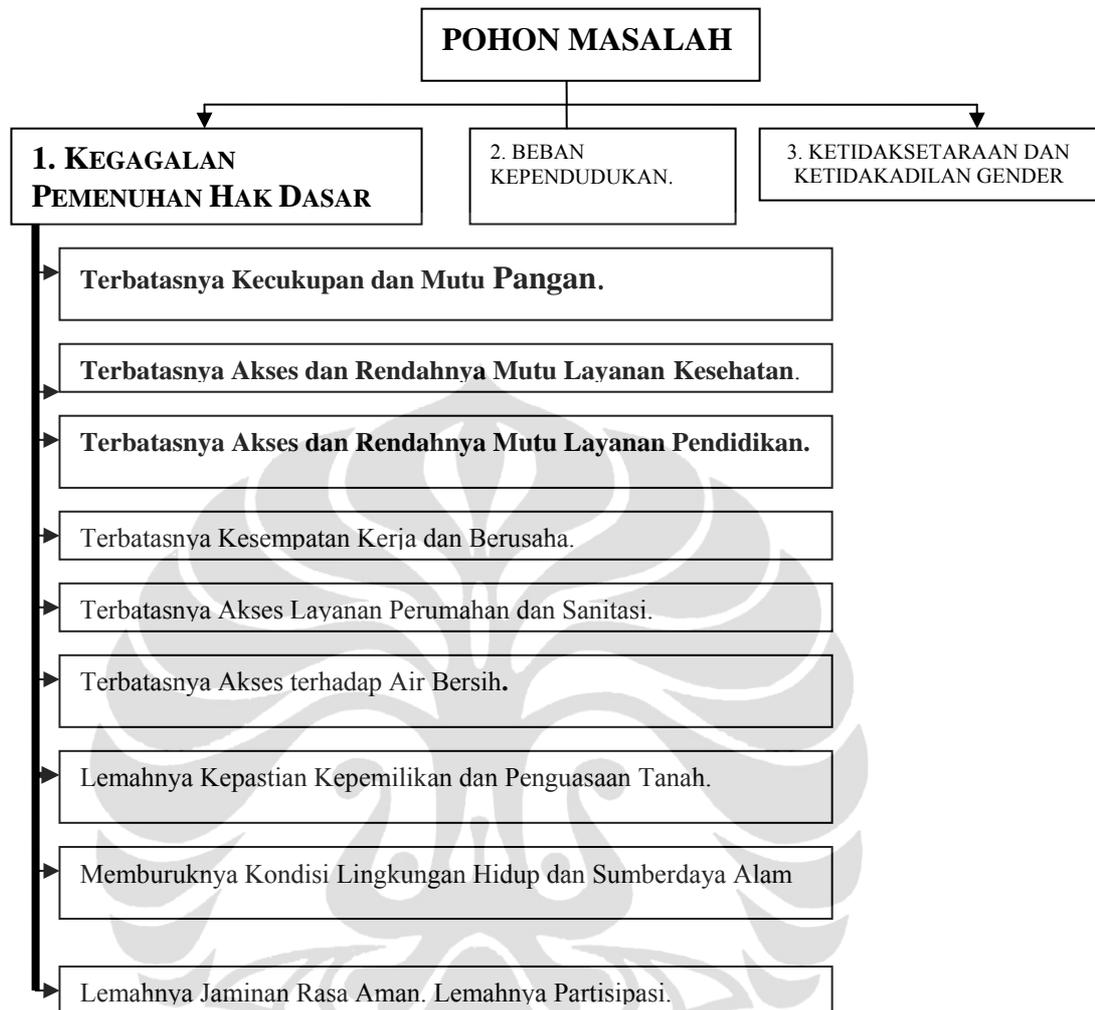
---

<sup>33</sup> <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=viewcat&ceid=-2&catid=6&bid=32&cid=15>

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

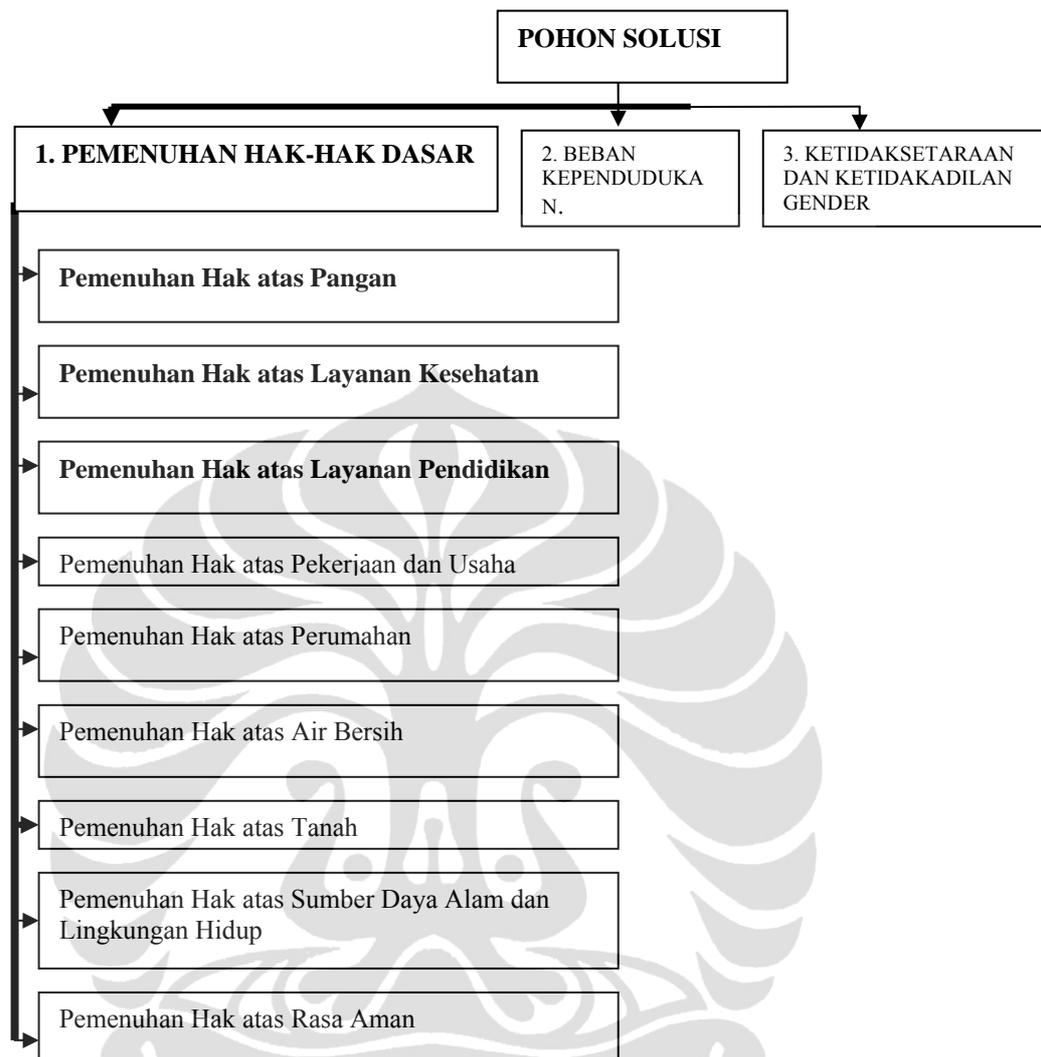
Secara singkat permasalahan kemiskinan tergambar dalam pohon masalah (Gambar 2.2). Dari Dokumen RPJM 2004 -2009 tergambar bahwa permasalahan kemiskinan disebabkan oleh 3 permasalahan yakni, pertama, kegagalan pemenuhan hak; kedua, beban kependudukan; dan yang ketiga, ketidaksetaraan dan keadilan jende. Sedangkan kegagalan pemenuhan hak dasar meliputi 9 hak dasar, yakni terbatasnya mutu dan pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan lemahnya jaminan rasa aman. Tiga diantaranya merupakan fokus dalam penelitian ini yakni terbatasnya mutu dan pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan dan terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Gambar 2.2. Pohon Masalah Kemiskinan



Sedangkan penyelesaian masalah kemiskinan tergambar pada pohon solusi seperti terlihat pada Gambar 2.3. Penyelesaian permasalahan kemiskinan adalah dengan menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender. Ada 9 hak-hak dasar yang harus dipenuhi, 3 diantaranya menjadi fokus dalam penelitian ini yakni; pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas layanan kesehatan dan pemenuhan hak atas layanan pendidikan.

Gambar 2.3. Pohon Solusi Kemiskinan



## 2.8. Penelitian-penelitian terdahulu

Penggunaan metode *Growth Incidence Curve* pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia oleh World Bank (2006). World Bank menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia sepanjang periode tahun 1980-1996, 1996-1999, 1999-2002, dan 2002-2004 semakin tidak *pro-poor*. Hasil ini didukung oleh Timmer (2005), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 1999-2002 semakin tidak *pro-poor* apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 1996-1999. Kedua peneliti tersebut menggunakan rata-rata konsumsi per kapita (hasil dari

*household survey*) dalam menghitung pertumbuhan ekonomi yang merupakan angka agregat.

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Hidayat (2007) yang melihat korelasi pertumbuhan ekonomi, ketidak merataan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999 – 2005 dengan menggunakan indeks Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia *Pro-poor*. Untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan ketidakmerataan pendapatan minimal sebesar 0,06 persen dan maksimal 0,56 persen menurunkan angka kemiskinan minimal sebesar 0,33 persen dan maksimal 0,83 persen. Dari hasil penelitian ini terdapat kejanggalan dimana pertumbuhan mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan namun mengurangi kemiskinan. Kemungkinannya adalah angka kemiskinan turun namun manfaat dari pertumbuhan lebih dirasakan oleh orang kaya daripada orang miskin.

